



Evaluasi PSAP No. 05 dan Sistem Informasi untuk Efisiensi serta Akuntabilitas Persediaan RSUD MDA

Muhammad Daffa Ardiansyah*, Samas Adimisa Mishbah Habibie

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

Email: 22013010079@student.upnjatim.ac.id, samas.adimisa.febis@upnjatim.ac.id

Korespondensi penulis: 22013010079@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 05 on inventories at RSUD MDA and to examine the role of digital information systems in enhancing efficiency and accountability in inventory management. The research employs a qualitative descriptive method with a case study approach, utilizing interviews, observations, and document reviews related to inventory management and hospital financial reporting. The findings indicate that the implementation of PSAP No. 05 at RSUD MDA is generally in compliance with the standards in terms of recognition, measurement, and disclosure of inventories, thereby supporting efficiency through FIFO/FEFO storage systems, procedure-based recording, and more accurate needs planning. In terms of accountability, the application of this standard strengthens transparency in recording, documentation, and auditable reporting. However, its effectiveness remains constrained by the limitations of manual and fragmented information systems across units, which may cause discrepancies between administrative records and physical inventories. This study highlights the urgency of integrating digital information systems across units to reinforce the implementation of PSAP No. 05, minimize human error, and improve efficiency and accountability in sustainable hospital inventory management.*

Keywords: PSAP No. 5, Inventory, efficiency, accountability, digital information system.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 tentang persediaan pada RSUD MDA serta mengkaji peran sistem informasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan persediaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen terkait pengelolaan persediaan dan laporan keuangan rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAP No. 05 di RSUD MDA secara umum telah sesuai dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan, sehingga mendukung peningkatan efisiensi melalui sistem penyimpanan FIFO/FEFO, pencatatan berbasis prosedur, serta perencanaan kebutuhan yang lebih akurat. Dari sisi akuntabilitas, penerapan standar ini memperkuat transparansi pencatatan, dokumentasi, serta pelaporan yang dapat diaudit. Namun, efektivitas penerapannya masih terkendala keterbatasan sistem informasi yang bersifat manual dan terfragmentasi antar-unit, sehingga berpotensi menimbulkan selisih data antara pencatatan administrasi dan kondisi fisik. Penelitian ini menekankan urgensi integrasi sistem informasi digital yang terhubung lintas unit untuk memperkuat implementasi PSAP No. 05, meminimalkan human error, dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan persediaan secara berkelanjutan di rumah sakit.

Kata kunci: PSAP No. 5, persediaan, efisiensi, akuntabilitas, sistem informasi digital.

LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai institusi pelayanan publik memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Untuk mendukung operasionalnya, RSUD membutuhkan ketersediaan

logistik berupa obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, hingga perlengkapan administrasi dan kebersihan. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan menjadi aspek strategis yang sangat memengaruhi mutu layanan dan efisiensi operasional rumah sakit.

Persediaan yang dikelola secara efisien dapat menjamin ketersediaan barang sesuai kebutuhan pelayanan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran. Dalam menciptakan tata kelola yang baik, pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui Peraturan Pemerintah, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 yang mengatur perlakuan akuntansi persediaan. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi penggunaan sumber daya (Idrus & Afiah, n.d.).

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam memperkaya literatur mengenai penerapan PSAP No. 05 pada rumah sakit sebagai entitas layanan publik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di rumah sakit maupun pemerintah daerah mengenai pentingnya pencatatan persediaan yang efisien, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan persediaan.

Pengelolaan persediaan di rumah sakit menuntut pencatatan yang akurat dan sistematis. PSAP No. 05 memberikan kerangka untuk pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sistem informasi, rendahnya pemahaman sumber daya manusia, hingga belum adanya evaluasi menyeluruh terkait dampak penerapan standar ini terhadap efisiensi manajerial. Tantangan lainnya ialah sistem informasi yang masih manual dan terfragmentasi antar-unit, sehingga rawan menimbulkan ketidaksesuaian data persediaan. Literatur empiris mengenai penerapan PSAP No. 05 pada sektor kesehatan, khususnya RSUD, juga masih terbatas.

Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan fokus pada penyembuhan, pemulihan, pencegahan penyakit, dan layanan rujukan (Desputri et al., 2024). Dalam praktiknya, instalasi farmasi harus mampu memenuhi kebutuhan obat tanpa mengalami kelebihan stok yang dapat

menyebabkan kedaluwarsa, maupun kekurangan stok yang membuat pasien mencari obat di luar rumah sakit (GUNAWAN et al., 2023).

Permasalahan umum yang sering ditemukan ialah adanya perbedaan antara catatan stok dan jumlah fisik persediaan di gudang. Ketidaksesuaian ini, baik berupa kelebihan maupun kekurangan, biasanya baru diketahui saat inventarisasi fisik, dan pencatatan kemudian disesuaikan dengan data hasil inventarisasi (Aisyah et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penerapan PSAP No. 05, serta ketiadaan evaluasi terkait dampaknya terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan persediaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada RSUD MDA dengan menekankan kesenjangan penelitian mengenai evaluasi penerapan PSAP No. 05 dan peran integrasi sistem informasi digital dalam mendukung implementasinya. Penelitian tidak hanya mengevaluasi dampak penerapan standar akuntansi, tetapi juga mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat akurasi pencatatan, transparansi, serta pengendalian persediaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana PSAP No. 05 mampu memperkuat sistem pencatatan, pengendalian, dan pelaporan persediaan, sekaligus mengidentifikasi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan persediaan di RSUD MDA.

KAJIAN TEORITIS

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 5)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 ada dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, yang berdasarkan sistem akrual, persediaan merupakan alat likuid berupa barang atau peralatan yang dirancang untuk mendukung operasional pemerintah ataupun dijual bahkan diserahkan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan. Berdasarkan PSAP No. 05 Paragraf 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa:

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah ;

- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Persediaan

(Rachmawati & Lentari, 2022) persediaan adalah barang atau bahan yang ditimbun dan nanti akan dipergunakan oleh perusahaan untuk mewujudkan tujuan lain sebagai contoh digunakan dalam proses produksi, sebagai suku cadang dari mesin atau peralatan maupun dijual kembali.

Dalam konteks sektor publik, khususnya rumah sakit, persediaan mencakup obat-obatan, alat medis, dan bahan pendukung lainnya sangat memengaruhi keberlangsungan pelayanan kesehatan. Maka dari itu, pengelolaan persediaan harus memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, akurasi pencatatan, dan akuntabilitas

Efisiensi

Efisiensi, sebagaimana dijelaskan oleh (Lau Alfreda Aplonia, 2023) adalah proses mencapai hasil sebesar-besarnya dengan jumlah input yang tetap, atau menghasilkan output tertentu dengan penggunaan input seminimal mungkin. Konsep ini merupakan rasio antara output dan input, yang dikaitkan dengan pencapaian target atau standar kinerja yang telah ditetapkan. Rasio efisiensi, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Devinci Antasena et al., 2023).

Akuntabilitas Pengelolaan Persediaan

(Pardana & Intan, 2024) Akuntabilitas mengacu pada kewajiban individu atau entitas untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang. Dalam pengelolaan persediaan, akuntabilitas sangat penting agar seluruh proses tercatat secara transparan dan dapat diaudit.

Akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik mencakup:

- Akuntabilitas keuangan: apakah pengelolaan dana sesuai standar akuntansi dan prosedur
- Akuntabilitas manajerial: apakah pelaksanaan program dilakukan secara efisien dan efektif.

Penerapan PSAP No. 05 seharusnya memperkuat akuntabilitas ini dengan menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan yang dapat ditelusuri, sistematis, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Sistem Informasi Digital

Dalam konteks pengelolaan persediaan modern, sistem informasi digital memainkan peran krusial dalam memastikan pencatatan yang akurat, pemantauan stok real-time, serta pelaporan yang transparan. Sistem seperti Enterprise Resource Planning (ERP) atau sistem berbasis cloud dapat mengintegrasikan fungsi logistik, akuntansi, dan pelaporan dalam satu platform yang efisien (Sahat et al., 2025). Kegagalan integrasi sistem sering menjadi penyebab utama terjadinya selisih data antara catatan administrasi dan kondisi fisik, yang dapat berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang berfokus pada RSUD MDA. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Persediaan dilakukan di rumah sakit tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan persediaan. Dalam hal ini, data kualitatif digunakan untuk menggambarkan proses dan konteks implementasi kebijakan.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik utama. Pertama adalah wawancara, yang dilakukan terhadap para pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan persediaan dan pencatatan laporan keuangan. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika lapangan. Kedua, peneliti melakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan dan distribusi barang persediaan, termasuk praktik pencatatan, sistem pengendalian internal, serta penggunaan aplikasi penunjang. Ketiga, dilakukan studi

literatur terhadap dokumen-dokumen penting seperti laporan persediaan dan SOP pengelolaan barang yang menunjukkan implementasi PSAP No. 05. Untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh peneliti menggunakan triangulasi dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengelolaan persediaan di RSUD MDA diatur melalui serangkaian kebijakan dan prosedur yang komprehensif. Kebijakan umum menetapkan tujuan untuk menjamin ketersediaan barang berkualitas dan tepat waktu, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta mencegah kehilangan atau kerusakan (Practica et al., 2024). Ruang lingkupnya mencakup seluruh jenis persediaan, dengan tanggung jawab yang telah terbagi. Adapun prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan pada RSUD MDA adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pengadaan Persediaan

Prosedur pengadaan persediaan di RSUD MDA dimulai dengan identifikasi kebutuhan persediaan yang akurat, baik berdasarkan permintaan dari unit-unit terkait, analisis data penggunaan sebelumnya, maupun proyeksi kebutuhan di masa mendatang. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana pengadaan yang komprehensif, mencakup jenis, jumlah, dan waktu pengadaan. Pemilihan pemasok dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan faktor kualitas, harga, dan reputasi. Setelah pemasok terpilih, pesanan pembelian diterbitkan secara resmi, dan status pesanan dipantau secara berkala hingga barang diterima.

2. Prosedur Penerimaan Persediaan

Prosedur penerimaan persediaan di RSUD MDA dirancang untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi yang baik. Saat barang tiba dari pemasok, petugas penerimaan melakukan pemeriksaan fisik secara teliti, mencakup jumlah, jenis, dan kondisi barang. Barang yang diterima kemudian dicocokkan dengan dokumen pesanan dan pengiriman untuk memastikan kesesuaian. Setelah verifikasi selesai, penerimaan barang dicatat ke dalam sistem persediaan secara akurat, dan laporan penerimaan barang dibuat sebagai bukti transaksi.

3. Prosedur Penyimpanan Persediaan

Prosedur penyimpanan persediaan di RSUD MDA bertujuan untuk menjaga kualitas dan keamanan persediaan, serta memudahkan akses saat dibutuhkan. Barang-barang ditata di gudang sesuai dengan jenis dan karakteristiknya, dengan menerapkan sistem penyimpanan yang sesuai, seperti FIFO (First-In , First-Out) atau FEFO (First-Expired , First-Out). Kondisi penyimpanan, seperti suhu dan kelembaban, dipantau secara berkala untuk mencegah kerusakan barang. Mutasi persediaan di gudang dicatat secara rinci pada sistem pencatatan elektronik, dan stok opname dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi data persediaan.

4. Prosedur Pendistribusian Persediaan

Prosedur pendistribusian persediaan di RSUD MDA dilakukan saat permintaan persediaan diterima dari unit pengguna, petugas gudang melakukan verifikasi permintaan dan memeriksa ketersediaan persediaan. Jika persediaan tersedia, barang dikeluarkan dari gudang dan dicatat pengeluarannya ke dalam sistem persediaan. Barang kemudian dikirim ke unit pengguna bersama dengan dokumen pengiriman yang relevan.

5. Penerapan Akuntansi Persediaan pada RSUD MDA

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) RSUD MDA, dijelaskan bahwa Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat .

Persediaan barang yang ada di RSUD MDA berupa :

1. Persediaan barang farmasi
2. Persediaan barang gizi
3. Persediaan barang alat tulis kantor dan cetakan
4. Persediaan perlengkapan rumah tangga dan bahan pembersih
5. Persediaan alat-alat listrik habis pakai

Pengakuan Persediaan RSUD MDA

Tabel 1 Perbandingan Pengakuan Persediaan dengan Ketentuan PSAP No. 05

PSAP No. 5	RSUD MDA	Keterangan
Diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.	Persediaan diakui pada saat diterima dan telah sesuai dengan dokumen penerimaan yang sah serta potensi manfaat ekonomi dapat dipastikan.	Sesuai
Diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.	Persediaan diakui pada saat hak kepemilikan atau kekuasaannya berpindah kepada RSUD MDA sesuai dengan proses administrasi dan pengesahan dokumen.	Sesuai
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik	Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di RSUD MDA.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 1 diatas perbandingan pengakuan persediaan antara ketentuan PSAP No. 05 dan kebijakan pengakuan persediaan di RSUD MDA, dalam hal ini pengakuan persediaan di RSUD MDA sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAP No. 05. RSUD MDA mengakui persediaan pada saat diterima dengan dokumen penerimaan yang sah, serta pada saat hak kepemilikan atau kekuasaannya berpindah. Selain itu, persediaan juga dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAP No. 05. Dengan demikian, tidak ada perbedaan signifikan antara kebijakan RSUD MDA dan ketentuan PSAP No. 05 dalam pengakuan persediaan.

Pengukuran Persediaan RSUD MDA

Tabel 2 Perbandingan Pengukuran Persediaan dengan Ketentuan PSAP No. 05

PSAP No. 5	RSUD MDA	Keterangan
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian	Pencatatan Persediaan RSUD MDA diperoleh dengan harga beli yang menggunakan Metode FIFO	Sesuai
Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri	RSUD MDA tidak melakukan produksi persediaan sendiri	Tidak sesuai

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan	RSUD MDA tidak melakukan penilaian persediaan yang diterima secara donasi	Tidak sesuai
--	---	--------------

Berdasarkan Tabel 2 diatas pengukuran persediaan di RSUD MDA umumnya sudah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 05. Persediaan yang diperoleh melalui pembelian dicatat menggunakan harga beli dengan metode FIFO, sesuai dengan ketentuan PSAP No. 05 yang mengharuskan biaya perolehan dicatat berdasarkan harga beli. RSUD MDA juga tidak memproduksi persediaan sendiri, sehingga tidak menerapkan biaya standar atau harga pokok produksi seperti yang diatur dalam PSAP No. 05. Selain itu, RSUD MDA tidak menerima persediaan melalui donasi atau rampasan, sehingga penilaian berdasarkan nilai wajar tidak diterapkan. Dengan demikian, meskipun ada beberapa ketentuan yang tidak relevan bagi RSUD MDA, pengukuran persediaan mereka tetap sesuai dengan prinsip yang ada dalam PSAP No. 05.

Pengungkapan Persediaan RSUD MDA

Tabel 3 Perbandingan Pengakuan Persediaan dengan Ketentuan PSAP No. 05

PSAP No. 5	RSUD MDA	Keterangan
a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; c) Kondisi persediaan	Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar berdasarkan harga pembelian, RSUD MDA tidak memiliki biaya standar karena tidak memproduksi barang sendiri, dan tidak melakukan penilaian persediaan terhadap barang yang didapat secara donasi. Dan untuk barang dalam kondisi rusak/usang tidak diungkapkan karena tidak ada transaksinya.	Sesuai

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat perbandingan antara ketentuan PSAP No. 05 dan penerapan akuntansi persediaan yang diterapkan oleh RSUD MDA sudah sesuai. Setiap pergerakan barang, baik masuk maupun keluar di RSUD MDA, langsung dicatat ke dalam kartu barang. Terkait dengan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengukur persediaan, rumah sakit menjelaskan bahwa pencatatan dilakukan berdasarkan harga beli saat pembelian terjadi. Dalam laporan keuangan, persediaan disajikan di neraca sebagai aset lancar, dengan nilai berdasarkan biaya perolehan, mengingat persediaan diperoleh melalui pembelian dan bukan hasil dari donasi ataupun rampasan.

Pembahasan

Dampak terhadap Efisiensi

Penerapan PSAP No. 05 di RSUD MDA, khususnya dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan, telah membantu menciptakan sistem pencatatan yang lebih sistematis dan berbasis prosedur. Proses pengakuan dilakukan saat barang diterima dan disertai dokumen sah, serta pengukuran menggunakan metode FIFO yang sesuai dengan standar.

Hal ini berkontribusi langsung terhadap efisiensi dalam bentuk:

- Minimnya pemborosan akibat tumpang tindih pengadaan atau barang kedaluwarsa karena penerapan sistem FIFO dan FEFO dalam penyimpanan.
- Peningkatan ketepatan perencanaan kebutuhan karena pencatatan persediaan yang terstandarisasi mendukung proyeksi kebutuhan unit pelayanan secara lebih akurat.
- Pengurangan risiko kelebihan/kekurangan stok, yang sebelumnya menjadi isu utama dalam pengelolaan persediaan di RSUD (sebagaimana disebut dalam abstrak dan latar belakang).

Namun demikian, efisiensi belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui kendala seperti perbedaan antara data pencatatan dengan kondisi fisik persediaan, yang menunjukkan bahwa masih ada potensi inefisiensi dalam pelaksanaan di lapangan, misalnya akibat belum maksimalnya sistem digital dan koordinasi antar bagian.

Dampak terhadap Akuntabilitas

Pada Penerapan PSAP No. 05 di RSUD MDA memberikan dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan persediaan. Hal ini tercermin melalui transparansi dalam proses pencatatan, di mana seluruh transaksi persediaan mulai dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan hingga distribusi telah dicatat secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali. Selain itu, adanya standarisasi prosedur dan pelaporan memastikan bahwa informasi persediaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi sektor publik. Dokumentasi yang lengkap dan tersusun rapi juga semakin memperkuat akuntabilitas, karena rumah sakit telah menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) serta laporan persediaan sesuai standar PSAP. Meskipun demikian, penerapan akuntabilitas tersebut masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah belum adanya sistem evaluasi berkala untuk menilai kesesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi fisik persediaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga belum optimal, mengingat sistem inventarisasi digital yang terintegrasi antar-unit masih belum sepenuhnya digunakan untuk mendukung efektivitas pengelolaan persediaan.

Potensi Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Digital

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, teridentifikasi bahwa sistem informasi pengelolaan persediaan di RSUD MDA masih bersifat parsial antar-unit, sehingga menyulitkan proses konsolidasi data, memperlambat pencatatan, dan meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi fisik.

Implementasi sistem digital yang terintegrasi diharapkan dapat:

- Mempercepat proses pencatatan barang masuk dan keluar secara real-time;
- Mengurangi kesalahan manusia (human error) akibat pencatatan manual;
- Meningkatkan koordinasi antar-unit, khususnya antara instalasi farmasi, logistik, dan bagian keuangan;
- Menyediakan laporan persediaan yang dapat diakses lintas bagian secara otomatis dan transparan.

Temuan ini memperkuat urgensi digitalisasi dalam mendukung keberhasilan implementasi PSAP No. 05 secara menyeluruh, terutama dalam konteks rumah sakit yang

memiliki beban logistik tinggi. Tanpa sistem informasi yang kuat dan terhubung, maka penerapan standar akuntansi berpotensi tidak memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi digital yang tidak hanya mencatat, tetapi juga menyediakan dashboard real-time yang terintegrasi dengan sistem keuangan dan manajemen rumah sakit. Hal ini akan memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap penerapan PSAP No. 05, tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari sisi keberlanjutan manajerial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Penelitian mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang persediaan di RSUD MDA menunjukkan bahwa penerapan PSAP No. 05 di RSUD MDA secara umum telah sesuai dengan ketentuan standar dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan persediaan rumah sakit. Efisiensi dicapai melalui penerapan sistem penyimpanan yang tertib (FIFO dan FEFO), pencatatan berbasis prosedur, serta perencanaan kebutuhan yang lebih akurat. Di sisi lain, akuntabilitas meningkat dengan adanya pencatatan yang transparan, dokumentasi yang lengkap, dan pelaporan yang dapat diaudit sesuai standar sektor publik.

Namun, efektivitas implementasi standar ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait perbedaan antara data administrasi dan kondisi fisik, serta keterbatasan sistem informasi yang masih bersifat manual dan terfragmentasi antar-unit. Hal ini menunjukkan bahwa PSAP No. 05 belum sepenuhnya optimal dalam mendukung efisiensi operasional dan transparansi pengelolaan. Oleh karena itu, integrasi sistem informasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Digitalisasi sistem persediaan yang terhubung lintas unit dipandang mampu memperkuat pencatatan real-time, meminimalkan human error, serta meningkatkan koordinasi dan keterlacakan data. Sistem ini akan memperkuat implementasi PSAP No. 05, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan secara berkelanjutan dalam konteks manajemen rumah sakit.

DAFTAR REFERENSI

Aisyah, S., Cahya Kusuma, I., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, P.

- (2023). IMPLEMENTATION OF MEDICINE INVENTORY ACCOUNTING BASED ON GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS STATEMENT NUMBER 05 AT CIAWI GENERAL HOSPITAL IN BOGOR. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2). <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Desputri, S., Tanjung, S. Z., Laili, H., Aulia, A., & Hasibuan, I. D. (2024). *Swasta X Di Kota Medan*. 5(983), 13626–13632.
- Devinci Antasena, Yosefina Crisstin, & Dalena Silawati. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nian Tana Sikka : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 51–70. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v1i3.49>
- GUNAWAN, S., Aravis, C. V., & Firmansyah, F. (2023). DESKRIPSI PENGELOLAAN PERSEDIAAN OBAT DI RUMAH SAKIT PMI BOGOR. *Jurnal Mitra Kesehatan*, 5(2), 135–147. <https://doi.org/10.47522/jmk.v5i2.196>
- Idrus, M., & Afiah, N. (n.d.). *Analisis Perlakuan Akuntansi Persediaan Obat-obatan Berdasarkan PSAP No. 05 Pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pinrang (Analysis of Accounting Treatment for Medicines Inventory Based on PSAP No. 05 at the Regional General Hospital in Pinrang Regency)*. <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Lau Alfreda Aplonia. (2023). Efektivitas dan Efisiensi melalui Pemanfaatan Runout Time (ROT) Method. *Jurnal Exchall (Economic Challenge)*, 5(1), 1–11.
- Pardana, D., & Intan, N. (2024). *PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN KINERJA APARATUR DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN LASALIMU Universitas Muhammadiyah Buton , Indonesia Info Article Received : Revised : Accepted : Publication : Keywords : Good*. 3(01), 66–84.
- Practica, M. R., Prihatin, D., Kurniawan, R., Ikhsan, S., & Astaran, J. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Obat – Obatan Berdasarkan Psap No 5 Pada Kantor Puskesmas Purnama Kecamatan Pontianak Selatan . *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(1), 55–65.
- Rachmawati, N. L., & Lentari, M. (2022). Penerapan Metode Min-Max untuk Minimasi Stockout dan Overstock Persediaan Bahan Baku. *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, 8(2), 143–148. <https://doi.org/10.30656/intech.v8i2.4735>
- Sahat, Diki Akhwan Mulya, & Samas Adimisa Mishbah Habiebie. (2025).

OPTIMALISASI CLOUD COMPUTING UNTUK MENINGKATKAN
KEBERLANJUTAN BISNIS: PERSPEKTIF SISTEM INFORMASI BISNIS.

Jurnal Menara Ekonomi, 11(1), 111–136.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing#/media/File:Cloud_computing.svg
%0A<https://www.it24hrs.com/2015/cloud-computing-and-cloud-definition/>
